

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KELUARGA DI KECAMATAN KRANGGAN, TEMANGGUNG

Wahyu Prabowo<sup>1</sup>, Okky Bagus Anggoro<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, MAGELANG  
Korespondensi : Prabowowahyu@untidar.ac.id

### ABSTRAK

Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia membuat masalah kependudukan semakin kompleks. Melihat begitu pentingnya program keluarga berencana dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga yang tidak terkendali maka tujuan pelaksanaan program KB haruslah berhasil dengan baik yaitu mendapatkan sasaran peserta KB baru sebanyak mungkin, apabila target mendapatkan peserta KB baru terpenuhi maka dapat dikatakan pelaksanaan program KB efektif. Pada kenyataannya masih dijumpai beberapa pasangan suami istri yang merupakan pasangan usia subur yang belum tertarik atau tidak mau sama sekali mengikuti program ini, artinya pasangan suami istri usia subur ini tidak memahami tentang program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah, pelaksanaan program pembangunan keluarga mulai tersendat, bahkan menjadi program yang terpinggirkan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah dengan analisis data interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi dilakukan untuk, mengecek keabsahan data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti. Kinerja implementasi program pembangunan KB dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan di Kecamatan Kranggan, Temanggung seperti penggunaan alat kontrasepsi dan bina lingkungan keluarga (BLK) sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi belum secara maksimal ini dikarenakan ada beberapa program yang terhenti dan tidak berjalan sesuai dengan harapan yaitu program upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang terhenti dikarenakan terkendala pada permodalan awal, pemasaran dan manajemen keuangannya

**Kata Kunci** : Kinerja Implementasi, Program Pembangunan KB, Kualitas Kesejahteraan

### PENDAHULUAN

Penduduk merupakan orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Adapun yang dimaksud penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia. Berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil sensus pada tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk yang demikian banyaknya, Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia membuat masalah kependudukan semakin kompleks. Padahal penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia. tapi dari sisi lain juga bisa menjadi beban oleh negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang diungkapkan Malthus(2004:104) bahwa pertambahan penduduk kian hari kian memberikan tekanan yang berat, dan jika tidak tercegah maka mengakibatkan kesengsaraan dan kelaparan yang merajalela. Tingkat pertumbuhan populasi Indonesia antara tahun 2000 sampai 2010 adalah sekitar 1.49 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi di propinsi Papua (5.46 persen), sementara pertumbuhan populasi terendah terjadi di propinsi Jawa Tengah (0.37 persen). Kota-kota terbesar di Indonesia ditemukan di pulau Jawa. Di sini kita menemukan Ibu Kota Jakarta yang memiliki lebih dari 10 juta penduduk menurut sensus resmi terbaru (data dari 2011). Angka yang tidak resmi kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Selain itu, setiap pagi sejumlah besar pekerja berjalan dari daerah perkotaan satelit menuju Jakarta untuk melakukan pekerjaan mereka. Pada sore atau malam hari mereka berjalan pulang ke kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Arus harian yang besar ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah di Jakarta.

Selama ini kita hanya fokus pada terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan keluarga. padahal yang harus disadari adalah menyelaraskan antara pendapatan keluarga dengan jumlah anggota dalam keluarga. Dan juga Perlu kerja keras, keuletan dan kerja sama yang baik dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA), pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka kelahiran seperti yang diinginkan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta/ alamiah yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan ilustrasi utuh dan dukungan terhadap laporan yang disajikan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah dengan analisis data interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi ini merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

## DISKUSI

### *Implementasi program KB di Kecamatan Kranggan, Temanggung*

Implementasi program KB di Kecamatan Kranggan, Temanggung sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang program keluarga berencana KB dan Kebijakan program Keluarga Berencana (KB) tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Sistem Informasi Keluarga. Partisipasi masyarakat Kecamatan Kranggan, Temanggung yang ditunjukkan dalam bentuk keterlibatan dan peran serta mereka dalam ber-KB dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Desa	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB	Presentase Peserta KB
1	Kranggan	820	502	61.22%
2	Badran	764	501	65.58%
3	Bengkal	657	418	63.62%
4	Pare	364	217	59.62%
5	Nguwet	596	418	70.13%
6	Ngropoh	613	468	76.35%
7	Pendowo	869	595	68.47%
8	Sanggrahan	781	609	77.98%
9	Klepu	606	425	70.13%
10	Kemloko	961	680	70.76%
11	Gentan	883	510	57.76%
12	Kramat	338	249	73.67%
13	Purwosari	758	601	79.29%
r	<b>Jumlah</b>	<b>9010</b>	<b>6193</b>	<b>69.70%</b>

Tabel partisipasi Masyarakat dalam ber-KB di Kecamatan Kranggan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta KB sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka partisipasi peserta KB aktifnya mencapai 69.70% dari total jumlah Pasangan Usia subur (PUS) sebanyak 9010 pasangan di seluruh kecamatan. Tujuan umumnya dari adanya program Keluarga Berencana adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ruang lingkup KB secara umum adalah kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur serta penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pengaturan laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan jumlah kelahiran di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan kependudukan nasional, yang dalam hal ini pelaksanaan program KB di daerah pada era otonomi perlu ditentukan sasaran kinerja program untuk mewujudkan keserasian kependudukan di berbagai bidang pembangunan. Dengan terkendalinya jumlah penduduk, maka akan tercipta generasi yang

berkualitas sehingga dapat meneruskan pembangunan Indonesia yang berkualitas. Implementasi program KB di Kecamatan Kranggan, Temanggung terdapat beberapa program pokok yaitu pelayanan alat kontrasepsi, bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Pendekatan implementasi program KB di Kecamatan Kranggan, Temanggung terhadap masyarakat yaitu dengan

- pendekatan kemasyarakatan yaitu diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakan peran serta masyarakat yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- Pendekatan *integrative* yaitu memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak.
- Pendekatan kualitas meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan (*provider*) dan penerima pelayanan (klien) sesuai dengan situasi dan kondisi.

Sedangkan sasaran dari implementasi program KB di Kecamatan, Kranggan, Temanggung dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program KB, namun dalam penelitian ini hanya dipertimbangkan beberapa faktor yang dianggap dominan yaitu :

### **1. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana kebijakan program harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Bagian dari kebijakan dan perintah penerapannya harus disalurkan pada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat dan harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Jadi prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten.

Efektifitas proses penyampaian informasi juga ditentukan oleh adanya ketepatan waktu dalam berkomunikasi. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi program dari pelaksana kepada kelompok sasaran berlangsung dengan berbagai metode yaitu penyuluhan, siaran pedesaan, dan bakohumas.

## 2. Disposisi pelaksana

Ada 3 (tiga) hal penting terkait dengan disposisi implementator: sifat demokratis, komitmen, dan kognisi yang dimiliki :

- (1). Sifat demokratis petugas PLKB dan masyarakat sudah berjalan dengan baik ini terbukti dari interaksi antara petugas PLKB dan masyarakat dalam setiap penyuluhan di setiap desa di Kecamatan Kranggan, serta petugas juga membuka tanya jawab dan pelayanan terhadap masyarakat/keluarga yang ingin ikut KB dan mengetahui lebih lanjut tentang KB ini.
- (2). Komitmen petugas LKB terhadap tugas yang diberikan dan mampu mengarahkan kebijakan program pembangunan keluarga berencana (KB) dengan baik sesuai dengan kebijakan program yang sudah ditetapkan.
- (3) Kognisi Pengetahuan tentang media yang dimiliki oleh petugas terbatas hanya balai desa dan kelompok masyarakat seperti PKK dan lain lain sebagai tempat penyuluhan, sementara itu sesungguhnya informan menginginkan pesan program KB ini kepada seluruh Pasangan Usia Subur (PUS), sehingga dibutuhkan penyesuaian waktu dan tempat penyuluhan bagi pasangan usia subur yang tidak punya akses terhadap balai desa. Serta pelaksanaan program KB mengalami berbagai kendala, antara lain sikap dari masyarakat cenderung dipengaruhi oleh keadaan masa lampaunya yang memandang, KB itu tugas wanita bukan pria. Selain itu muncul juga parasangka yang memandang KB itu berbahaya dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan

## 3. Sumber daya

Meskipun sumber daya mencakup beberapa hal, namun pada penelitian ini yang dipertimbangkan adalah sumber daya keuangan (dana), sumber daya manusia (staf), dan fasilitas-fasilitas.

- (1). Sumber daya manusia, Untuk jumlah PLKB Kecamatan Kranggan semuanya berjumlah 3 orang petugas serta 1 Kepala UPT DPPKBPPA Kecamatan Kranggan , yaitu 2 (dua) orang PLKB koordinator atau Pengendali program, 1 (satu) orang PLKB pertama. Dari jumlah itu 2 (dua) orang berpendidikan SMA, 1 orang berpendidikan D-III , satu orang berpendidikan S2. serta dari segi usia ada 2 orang petugas PLKB yang sudah memasuki pensiun ,menjadikan rendahnya mereka dalam merespon kebijakan, serta terbatasnya petugas penyuluh yang hanya 3 orang di Kecamatan Kranggan.
- (2). Sumber daya finansial didapat dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan BKKBN, akan tetapi masalah dana merupakan masalah utama yang merupakan masalah klasik sehingga ada program yang mengalami kegagalan seperti contoh UPPKS yang terhenti karena masalah terkendala pada pendanaan awal, pemasaran, dan manajemen keuangannya, karena dana yang minim sehingga program UPPKS ini tidak berjalan di Kecamatan Kranggan, didalam implementasi program KB di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung besarnya dana yang dialokasikan mempunyai keterkaitan yang erat terhadap keberhasilan program. Dan dana ini sudah dianggarkan dari instansi yang terkait yaitu kantor BKKBN Kabupaten Temanggung.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian implementasi program pembangunan keluarga berencana di Kecamatan Kranggan, Temanggung, studi kasus peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kranggan sudah berjalan baik secara kualitas ketahanan keluarga, akan tetapi secara keseluruhan ada program yang belum berjalan secara maksimal yaitu dalam pembinaan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan Keluarga Berencana di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung : (1) Secara substantif implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung telah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. sebagai respon atas regulasi desentralisasi kewenangan bidang Keluarga Berencana dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang indikasinya masih adanya beberapa PLKB yang hanya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sudah memasuki masa pensiun di UPT Kecamatan Kranggan serta terbatasnya PLKB yang hanya 3 orang, hal ini berimplikasi pada pelaksanaan program yang tidak maksimal, yang umumnya mereka tunjukkan dengan keengganan implementator untuk meningkatkan kualitas diri. Kondisidemikian juga menjadikan isi pesan implementator sangat terbatas pada apa yang didapatkan tempo dulu. (3) Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kranggan sendiri bisa di katakan sangat mendukung dan baik, dan kebanyakan masyarakat Kecamatan Kranggan telah menggunakan alat kontrasepsi dan ikut dalam program pokok gerakan KB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BKKBN. (1988). *Sejarah Perkembangan KB di Indonesia*. Jakarta: BKKBN
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Ali. (1974). *Agama Keluarga Berencana dan Kependudukan*. Jakarta: BKKBN, Biro Penerangan dan Motivasi .
- Nasiruddin Latief. (1981) *KB di Pandang dari Sudut Hukum Islam*. Jakarta: BKKBN
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.